

Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan terhadap Kecendrungan Aparatur Pemerintah Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas)

Kholida Atiyatul Maula

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: Kholidaathiyatulmaula@gmail.com

Abstract

This study uses primary data through surveys and distribute quisoner to 30 respondents consisting of heads of sections and sub-sections DPPKAD, SETDA and BAPPEDA in Banyumas, to perform hypothesis testing methods quantitative descriptive survey. This study analyzed using multiple regression analysis. With the object of perception research include local government officials about income satisfaction, unethical behavior, effectiveness of internal controls, and the tendency to commit fraud.

Based on the results of research and analysis using multiple regression analysis showed that partially or simultaneously variable income satisfaction, unethical behavior and the effectiveness of internal control (significant) against the tendency of government officials commit accounting fraud. The implication of this research is The effectiveness of internal control that the better it will reduce the tendency to commit fraud solution of this problem is in every line of the organization both sectors government and the private sector by modifying its internal control system that separates the task of recording of transactions that must be transparent and clear and penerepan authority and responsibilities maximum to reduce the chances of fraud, unethical behavior management is getting better is not necessarily reduce the tendency to commit fraud solution of this problem is the prevalence of the organization should be appropriate, independent in financial reporting, transparency of income beyond the basic salary, and improved performance manajemen. Kepuasan increasing income will reduce the tendency to commit fraud, the solution of the problem is with the level of salary (pay level) should correspond employees, salary increases (pay raise) to be adapted to the level of employment or class of employees.

Keywords: Income Satisfaction, Unethical Behavior, The effectiveness of Internal Control, Trends Doing Fraud

A. PENDAHULUAN

Korupsi banyak terjadi di negara yang sedang berkembang, Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga

2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang tercatat berjumlah 549 dengan 831 terpidana. Namun, "Update di tahun 2014 seringkali berisi peningkatan putusan-putusan untuk tahun sebelumnya. (Ayuningtiyas, 2016)

Di Indonesia *fraud* hampir terdapat di setiap lini organisasi, mulai dari jajaran manajemen/pimpinan puncak sampai kepada jajaran pelaksana. Fraud diartikan sebagai berbagai bentuk kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan rekening, penyelewengan, dan lain-lain (Lanham et al, 1987) *Fraud* dilakukan seorang untuk memperoleh kekayaan atau keuangan melalui aplikasi kecurangan atau penipuan. Unsur-unsur fraud dapat dijelaskan yakni: *conversion* (penipuan), *concealment* (menyembunyikan), dan *theft* (pencurian). Terdapat tiga jenis *fraud* yakni: *Fraudulent financial reporting*, *Missappropriation of assets*, *corruption* *Fraud* juga dapat dikategorikan sebagai berikut (lanham et al, 1987)

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting bagi pelaku bisnis. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006). Umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi (Wilopo, 2006). Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark up yang merugikan perekonomian negara. Pada tahun 2008, tercatat KPK menangani 47 kasus dalam tahap penyidikan dan pelimpahan ke pengadilan, serta 33 kasus yang telah divonis, atau total 80 kasus. Pengadaan barang dan jasa masih menjadi modus utama, yakni 34 kasus dari 80 kasus (42,50%); Penyalahgunaan Anggaran 17 kasus; Penyuapan 15 kasus; Pungutan Liar 14 kasus; dan kasus terkait suap pada pejabat negara serta kasus dengan kerugian negara di atas 80 miliar rupiah (11,25%) Sawardi dan Sudarmo (2008).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, yang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota diberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002). Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara berkesinambungan, baik dalam masalah keuangan daerah maupun anggaran daerah.

Teori *GONE Fraud* (J. Bologna, 1995 dalam Sawardi dan Sudarmo, 2008) menjelaskan faktor-faktor pendorong seseorang melakukan tindak kecurangan dan perilaku tidak etis. Faktor-faktor tersebut yaitu : (1) keserakahan (*greed*) ; (2) kesempatan (*opportunity*) ; (3) kebutuhan (*need*) ; dan (4) pengungkapan (*exposure*). Faktor keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku *fraud*, disebut sebagai faktor individu. Faktor individu berada di luar kendali manajemen karena bergantung pada masing-masing diri pribadi manusia. Faktor kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud*, atau disebut sebagai faktor generik (Sawardi dan Sudarmo, 2008).

Tindakan curang dan perilaku tidak etis yang dilakukan seseorang disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi sehingga timbul keserakahan (*greed factor*). Kompensasi yang sesuai diharapkan mampu mengurangi adanya keinginan untuk melakukan tindakan curang. Kompensasi tersebut bertujuan agar manajemen dapat bertindak sesuai keinginan pemilik perusahaan dan tidak melakukan tindakan menyimpang (Fauwzi, 2011).. Tindakan menyimpang seperti perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan moralitas manajemen.

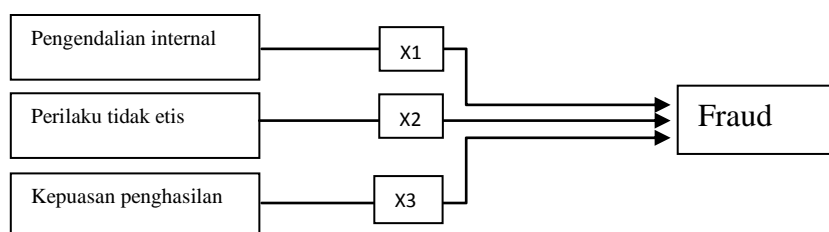
Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara berkesinambungan, baik dalam masalah keuangan daerah maupun anggaran daerah. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka menarik untuk diteliti pengaruh kepuasan penghasilan, moralitas aparatur pemerintah daerah dan kepuasan penghasilan terhadap kecenderungan melakukan *fraud*, sehingga mendukung pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel secara berkesinambungan.

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan juga tergantung pada tanggung jawab dan moralitas perusahaan. Pada tingkat operasional, tanggung jawab moral ini diwakili oleh manajemen sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan mencerminkan moralitasnya. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen juga dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi. Asimetri informasi disebabkan oleh permasalahan keagenan yang terjadi bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Menurut Wilopo (2006) untuk mengatasi permasalahan keagenan seharusnya manajemen perusahaan melaksanakan aturan akuntansi dengan benar. Kepuasan penghasilan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi. Apabila penghasilan sesuai maka individu diharapkan mendapatkan kepuasan sehingga tidak melakukan perilaku tidak etis serta berlaku curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Sebaliknya penghasilan yang tidak sesuai akan mendorong individu untuk cenderung melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi atau Fraud.

1. Apakah faktor-faktor pendorong tindak kecurangan berpengaruh terhadap fraud?
2. Apakah kepuasan penghasilan berpengaruh terhadap *fraud*?
3. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud*?
4. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*?

1. Model Penelitian



Gambar 1. Model Hubungan Variabel Penelitian

2. Hipotesis Penelitian

1. **H1:** Pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kepuasan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparaturnya melakukan *fraud*.

2. **H2:** Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*.
3. **H3:** Perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*.
4. **H4:** Kepuasan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud*.

C. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

1. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang menerima delegasi wewenang dan tanggungjawab mengelola *asset* dan keuangan dan mengawasi laporan keuangan daerah, serta yang terlibat langsung dalam penggunaan dana yang dianggarkan pada DPPKAD, Sekretariat Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas.

Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu petugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan, penyusunan serta pengawasan penggunaan asset dan keuangan Pemerintah Daerah.

Responden dari penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari 14 orang kepala bagian dan subbagian di DPPKAD), 13 orang terdiri dari 1 orang asisten dan 12 orang kepala bagian serta kepala subbagian Setda serta 3 orang kepala bagian dan kepala subbagian Bappeda.

2. Definisi Konseptual dan Operasional

a. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Teori ini sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila : (a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan (b) bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (Wilopo, 2006).

Perkembangan struktur kepemilikan memberi gambaran semakin banyak kepentingan yang perlu diakomodasi dalam hubungan kontrak. Ada kemungkinan kepentingan tersebut saling bertentangan dan melebihi kapasitas yang wajar. Hal

demikian mendorong pimpinan berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi (Thoyibatun, 2009). Jensen dan Meckling (1976), Brickley and James (1987), dan Shivdasani (1993) menjelaskan bahwa prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal perusahaan yang efektif.

b. Fraud

Menurut *Webster's New World Dictionary* yang dikutip Sawardi dan Sudarmo (2008), kecurangan adalah terminologi umum, yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan di atas orang lain melalui cara penyajian yang salah.

Indikator variabel kecenderungan kecurangan akuntansi : 1) Manipulasi 2) Penghilangan peristiwa 3) Penerapan prinsip akuntansi 4) Salah saji akibat pencurian 5) Salah saji akibat perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.

c. Keefektivan Pengendalian Internal

Menurut COSO (2002), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen dan pegawai lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dalam pencapaian tujuan sebagai Operasional, Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber-sumber daya. Usaha penjagaan asset merupakan bagian dari tujuan ini. Ketaatan berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan Keuangan, Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998), sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Indikator variabel keefektivan pengendalian internal adalah : 1) Penerapan wewenang dan tanggungjawab 2) Pencatatan transaksi 3) Pengendalian fisik 4) Sistem akuntansi 5) Pemantauan dan evaluasi

d. Perilaku Tidak Etis

Dalam teori perkembangan moral Kohlberg (1969) seperti yang dikutip Wilopo (2006) dinyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan prakonvensional, tahapan konvensional, dan tahapan postkonvensional. Moralitas

manajemen pada tahapan post konvensional menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi. Dalam kematangan moral ini menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis.

Indikator variabel perilaku tidak etis manajemen : 1) Independensi dalam pembuatan laporan keuangan 2) Penghasilan diluar gaji pokok 3) Kinerja manajemen 4) Kelaziman organisasi 5) Keberlangsungan perusahaan 6) Prinsip kesejahteraan.

e. Kepuasan Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999), penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berdasarkan definisi tersebut, penghasilan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*).

Kepuasan gaji diukur dengan empat dimensi PSQ (*pay satisfaction questionnaire*) (Suwandi dan Indriantoro, 1999), dengan indikator sebagai berikut :

1) Tingkat gaji (*pay level*) 2) Kompensasi (*benefits*) 3) Kenaikan gaji (*pay raise*) 4) Struktur dan administrasi penggajian (*Pay structure and administration*).

D. PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,367 yang berarti bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa koefisien reliabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, maka semua pertanyaan untuk setiap variabel tersebut dinyatakan *reliabel*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas diuji dengan rumus *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansi dari hasil uji normalitas adalah 0,435 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bernilai kurang dari 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga semua variabel bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa $\text{sig} > \alpha$ dengan α 0,05. Dengan demikian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model ini.

3. Uji Pengaruh Simultan

Berdasar hasil perhitungan dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen atau $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,934, sedangkan nilai F_{hitung} sebesar 6,596. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > \text{nilai } F_{\text{tabel}}$ atau berada pada daerah penolakan H_0 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kepuasan penghasilan, perilaku tidak etis dan keefektivan pengendalian internal secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*, dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis, kepuasan penghasilan, dan keefektivan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud diterima*.

4. Uji Pengaruh Parsial

Berdasar hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α) = 0,05 diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,045.

a. Keefektivan Pengendalian Internal

Berdasarkan nilai t_{hitung} variabel keefektivan pengendalian internal sebesar -4,221 dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,045. Berdasar hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $-t_{\text{hitung}} < \text{nilai-}t_{\text{tabel}}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keefektivan pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa **keefektivan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud*, diterima**.

b. Perilaku tidak etis

Berdasarkan nilai t_{hitung} variabel perilaku tidak etis sebesar 1,539 dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,045. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $-t_{hitung} < \text{nilai-}t_{tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel perilaku tidak etis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa **perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud*, diterima**

c. Kepuasan Penghasilan

Berdasarkan nilai t_{hitung} variabel kepuasan penghasilan sebesar -0,009 dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai $-t_{tabel}$ sebesar -2,045. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai $-t_{hitung} < \text{nilai-}t_{tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa variabel kepuasan penghasilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa **kepuasan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud*, diterima**

5. Uji hipotesis

a. Analisis Regresi Pengaruh Kepuasan Penghasilan, Perilaku Tidak Etis Manajemen, dan Keefektivan Pengendalian Internal terhadap terhadap Kecenderungan Melakukan *Fraud*.

Untuk mengetahui pengaruh variabel Kepuasan Penghasilan, perilaku tidak etis Manajemen dan Keefektivan Pengendalian Internal terhadap kecenderungan melakukan *Fraud* pada Dinas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dilakukan dengan bantuan Program SPSS 18for Windows diperoleh hasil seperti dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t _{hitung}	Probabilitas
Pengendalian internal	-0,625	-4,221	0,000
Perilaku tidak etis	0,181	1,539	0,136
Kepuasan penghasilan	-0,001	- 0,009	0,993
Konstanta = 5,769			
Adjusted R Square = 0,375			
F _{hitung} = 6,596			

Sumber : Data primer yang diolah 2016

Berdasarkan tabel 1 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,769 - 0,625 X_1 + 0,181 X_2 - 0,001 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 5,769 berarti variabel kecenderungan melakukan *fraud* adalah sebesar 5,769 satuan dengan asumsi bahwa variabel kepuasan penghasilan, moralitas dan pengendalian interen konstan.

Koefisien X_1 sebesar -0,625 berarti variabel keefektivan pengendalian internal mempunyai hubungan yang negatif dengan variabel kecenderungan melakukan *fraud*, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian internal akan menurunkan kecenderungan aparat pemerintah melakukan *fraud*. Jika terjadi kenaikan variabel keefektivan pengendalian internal sebesar satu satuan maka akan menurunkan variabel kecenderungan melakukan *fraud* sebesar 0,625 satuan, dengan asumsi bahwa variabel harga tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Koefisien X_2 sebesar 0,181 berarti variabel perilaku tidak etis mempunyai hubungan yang positif dengan variabel kecenderungan melakukan *fraud*, hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel tidak etis akan menaikkan variabel kecenderungan melakukan *fraud*. Jika terjadi kenaikan variabel perilaku tidak etis sebesar satu satuan maka akan meningkatkan variabel kecenderungan melakukan *fraud* sebesar 0,181 satuan, dengan asumsi bahwa variabel harga tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Koefisien X_3 sebesar 0,001 berarti variabel kepuasan penghasilan mempunyai hubungan yang negatif dengan variabel kecenderungan melakukan *fraud*, hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel kepuasan penghasilan akan menurunkan

variabel kecenderungan melakukan *fraud*. Jika terjadi kenaikan variabel kepuasan penghasilan sebesar satu satuan maka akan menurunkan variabel kecenderungan melakukan *fraud* sebesar 0,001 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

6. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Keefektivan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Aparatur Pemerintah Melakukan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel keefektivan pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik keefektivan pengendalian internal pegawai maka akan mengurangi kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.

Komisi *Treadway* (USA) yang sekarang bernama COSO (2002) menyimpulkan bahwa pencegahan utama terhadap terjadinya kecurangan adalah dengan adanya sistem keefektivan pengendalian internal yang kuat. Keefektivan Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kecenderungan melakukan *fraud* dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan melakukan *fraud* lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem keefektivan pengendalian internal yang baik. Keefektivan pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan *fraud*. Smith *et al.*, (1997) menyatakan bahwa keefektivan pengendalian internal yang efektif akan mengurangi kecenderungan melakukan *fraud*.

b. Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Aparatur Pemerintah Melakukan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel perilaku tidak etis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis pegawai maka akan meningkatkan kecenderungan pegawai melakukan *fraud*.

Prinsip etika suatu manajemen diwakili oleh perilaku manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Jika perilaku yang ditunjukkan oleh manajemen cenderung tidak etis maka dapat menyebabkan terjadinya kecenderungan

kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Cressey (dalam Suradi, 2007) bahwa unsur pengaruh karakteristik pribadi seseorang terhadap kecenderungan melakukan tindak kecurangan ditandai dengan perilaku tidak etis.

Kecenderungan *fraud* juga dipengaruhi oleh perilaku tidak etis orang yang terlibat didalamnya. Dalam suatu perusahaan atau instansi perilaku tidak etis manajemen sangat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang mungkin timbul dalam perusahaan. Hasil penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa meningkatnya perilaku tidak etis manajemen dapat menurunkan kecenderungan melakukan *fraud*.

c. Pengaruh Kepuasan Penghasilan Terhadap Kecenderungan Aparatur Pemerintah Melakukan *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kepuasan penghasilan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kecenderungan melakukan *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pegawai terpuaskan penghasilannya maka kecil kemungkinan melakukan *fraud* atau kecurangan.

Kepuasan Penghasilan juga menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindak kecurangan. Tindakan tersebut didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa kepuasan penghasilan yang sesuai tidak menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi atau *Fraud*. Hal ini disebabkan karena jumlah kepuasan penghasilan dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan manajemen serta hasil yang diperoleh dengan melakukan kecurangan akuntansi lebih besar dibanding

Hasil penelitian ini berbeda dengan berbagai teori yang selama ini berlaku di ilmu akuntansi yang sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi khususnya teori keagenan (*agency theory*). Namun hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Tang dan Chiu (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian gaji yang memuaskan meningkatkan komitmen organisasi, tetapi sekaligus meningkatkan kecurangan

dari para karyawan dan eksekutif di Hongkong. Jumlah kompensasi yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan keinginan manajemen dan tidak menciptakan keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara manajemen dan prinsipal.

Endang (2005) mendefinisikan kepuasan atas penghasilan sebagai persepsi kepuasan atas gaji atau upah langsung, sedangkan kepuasan atas struktur atau pengadministrasian gaji didefinisikan sebagai persepsi kepuasan dengan hirarki gaji internal dan metode yang digunakan untuk mendistribusikan gaji. Kepuasan gaji didasarkan pada ide bahwa seseorang akan terpuaskan dengan gajinya, ketika persepsi terhadap gaji dan apa yang mereka pikirkan sesuai dengan semestinya. Bagi seorang pegawai, gaji merupakan suatu *outcome* atau *reward* yang penting.

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepuasan penghasilan, perilaku tidak etis dan keefektivan pengendalian internal berpengaruh (signifikan) terhadap kecenderungan aparatur pemerintah melakukan *fraud*.
- b. Keefektivan Pengendalian Internal berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*.
- c. Perilaku tidak etis Manajemen berpengaruh positif (signifikan) terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*.
- d. Kepuasan Penghasilan berpengaruh negatif (signifikan) terhadap kecenderungan aparatur daerah melakukan *fraud*

2. Implikasi

Berdasarkan pada hasil analisis data, maka dapat diperoleh beberapa implikasi sebagai berikut :

- a. Keefektivan Pengendalian Internal yang semakin baik akan mengurangi kecenderungan melakukan *fraud* solusi dari masalah ini adalah dalam setiap lini organisasi baik sector pemerintah maupun sector swasta dengan caramemodifikasi sistem pengendalian internal yang memisahkan tugas pencatatan transaksi yang haruslah tranparan dan jelas serta penerepan

- wewenang dan tanggungjawab yang maksimal untuk mengurangi peluang terjadinya tindak kecurangan
- b. perilaku tidak etis Manajemen yang semakin baik belum tentu mengurangi kecenderungan melakukan *fraud* solusi dari masalah ini adalah dengan kelaziman organisasi harus sesuai, independensi dalam pembuatan laporan keuangan, transparansi penghasilan diluar gaji pokok, dan perbaikan kinerja manajemen.
 - c. Kepuasan Penghasilan yang makin meningkat akan mengurangi kecenderungan melakukan *fraud*, solusi dari masalah tersebut yaitu dengan tingkat gaji (*pay level*) pegawai haruslah sesuai, kenaikan gaji (*pay raise*) haruslah disesuaikan dengan tingkat pekerjaan atau golongan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve. 2009. *Fraud Examination*. Thomson South-Western.
- Brickley, J. A., and C. M. James. 1987. *The takeover market, corporate board composition and ownership structure: The case banking*. The Journal of Law and Economics, vol. 30 (April), pp: 161-180.
- Buckley, M. R., D. S. Wiese M. G. and Harvey, 1998. *An Investigation into Dimensions of Unethical Behavior*. Journal of Education for Bussiness73 (5), pp: 284-290.
- Baron, R, A dan Bryne, D. 2006. *Psikologi Sosial*. Edisi 10. Erlangga. Jakarta
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2002. *Fraudulent Financial Reporting: 1987-1999: An Analysis of U.S. Public Companies*. New York
- Dallas, Lynne L., 2002. *A Preliminary Inquiry into the Responsibility of Corporations and Their Directors and Officers for Corporate Climate: The Psychology of Enron's Climate*. Working Paper di-download dari Social Science Research Network.
- Dessler, Gary. 1998. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Terjemahan oleh Agus Dharma. Prentice Hall. New Jersey.
- Dijk, M. V. 2000. *The Influence of Publication of Financial Statement, Risk of Takeover and Financial Position of the Auditee on Public Auditors' Unethical Behaviour*. Journal of Business Ethics. 28(4), pp: 297-305.
- Fauwzi, Glifandi. 2011. *Analisis Pengaruh Keefektivan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Endang, Hersusdadikawati. 2005. Pengaruh Kepuasan Gaji terhadap Keinginan untuk Berpindah Kerja, dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Intervening. *Jurnal. Studi Manajemen dan Organisasi*, vol. 2 No.1
- Ghozali, Imam. 2005. *Metode Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Metode Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., dan Donnelly, Jr., J.H. 1997. *Organisasi*. Terjemahan oleh Darkasih. Erlangga. Jakarta.
- Hendrikson, Eldon, S. and Michael F. van Breda. 1992. *Accounting Theory*, 5th ed. Richard D. Irwin, Inc. Chicago.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta
- Jensen, M. C., and W.H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, October, pp 305-360. University of Rochester. Rochester.
- McAfee, Ouida, L., 2008. Current Characteristics of Faculty Development in Public Two-year Colleges in Arkansas. Dissertation. Capella University. Arkansas.
- Mayangsari, Sekar & Wilopo. 2002. *Konservatisme Akuntansi, Value Relevance dan Discretionary Accruals*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 3, pp : 291-310.
- Moningka, Arvindo. 2007. *Pengaruh Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompetensi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Perusahaan Ritel di Kota Manado, Tomohon, dan Bitung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.